

## GERAKAN LITERASI POLITIK PEREMPUAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM 2019-2020

**Muhammad Candra Syahputra**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia  
*candrasyach@gmail.com*

DOI: 10.33852/jurnalin.v4i2.216

Received: July 2020

Accepted: November 2020

Published: December 2020

### Abstract :

*Pemilihan umum (Pemilu) is a five-year moment to elect the regional head, legislative, president and vice president as well as a democratic party in Indonesia. As a moment of political contestation in the Pemilu, in its implementasion is is often accompanied by violations committed by pairs of candidates who are contesting the election, such as money politics, politicization of SARA an so on. Nahdlatul Ulama as the largest community organization in Indonesia and even the world, plays an important role in carrying out political literacy in society, Nahdlatul Ulama women who are members of Pimpinan Wilayah Fatayat NU Lampung and Pengurus Koordinator Cabang Korps PMII Puteri Lampung Through political luteracy programs make a positive contribution in welcoming the Pemilu 2019-2020. This study uses qualitative approach, while the data sources were obtained through interviews, observations, documentation and literature related to the topic of discussion. The Nahdlatul Ulama Women's Political Literacy Movement cooperates with the organizers of the Pemilu namely Komisi Pemilihan Umum (KPU) and Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) as a stakeholder. The Nahdlatul Ulama women through these programs aim to create a dignified democracy and be able to produce leaders who bring positive changes to the region and the country.*

**Key words :** Women, Nahdlatul Ulama, Politic Literacy, Pemilu

### Abstrak :

*Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen lima tahunan pemilihan kepala daerah, legislatif, presiden dan wakil presiden sekaligus pesta demokrasi di Indonesia. Sebagai momen kontestasi politik Pemilu dalam pelaksanaannya seringkali diwarnai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang bertarung dalam Pemilu seperti politik uang, politisasi SARA dan lain sebagainya. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia bahkan dunia, memainkan peran pentingnya dalam melakukan literasi politik kepada masyarakat, Perempuan Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Pimpinan Wilayah Fatayat NU Lampung dan Pengurus Koordinator Cabang Korps PMII Puteri Lampung melalui program-program literasi politik memberikan kontribusi positif dalam menyambut Pemilihan Umum tahun 2019-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun sumber data diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan. Gerakan Literasi Politik Perempuan Nahdlatul Ulama menggandeng penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai stakeholder. Perempuan Nahdlatul Ulama melalui program-program tersebut bertujuan untuk menciptakan demokrasi bermartabat dan mampu melahirkan pemimpin yang membawa perubahan positif bagi daerah dan negara.*

**Kata Kunci :** Perempuan, Nahdlatul Ulama, Literasi Politik, Pemilu

## PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia telah banyak memberikan kontribusi besar baik tingkat nasional (Feillard, 1999), maupun internasional (Masyhuri, 2016). NU merupakan *jamiyyah* yang lahir dari suasana dan budaya pesantren dimana doktrin Islam tradisional telah berakar dan dilestarikan (Ismail, 2011). Islam tradisional sebagai warisan budaya Islam Nusantara yang diajarkan para Walisongo dengan ajaran yang ramah, terbuka, inklusif (Bizawie, 2016). Walisongo dalam berdakwah melalui perangkat kebudayaan, sehingga ajaran Islam mudah diterima (Dakir & Fauzi, 2019). Bahkan, Islam mampu melebur dengan budaya sehingga terjadinya akulturasi dan menjadi budaya baru khas Islam Nusantara (Muzakki, 2020; Baharun & Badriah, 2020). Paham inklusivitas sebagai warisan ajaran Walisongo dilestarikan NU, bahkan paham inklusivitas NU menjadi barometer gerakan Islam moderat di Dunia (Anwar, 2019).

NU merupakan ormas keagamaan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, sikap nasionalisme NU telah terbukti sebagaimana perjuangan para ulama pesantren, santri dari kalangan NU selalu berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, seperti fatwa Resolusi Jihad pada Oktober 1945 oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari (Mardiyah, 2015). Resolusi jihad mampu menggerakkan santri-santri di pesantren untuk berjuang melawan penjajahan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua (Dakir & Anwar, 2019), menjadi medan penguatan heroisme melawan kolonialis (Goncing, 2015). Setelah memperjuangkan kemerdekaan, tugas para penerus bangsa ini adalah mempertahankan kemerdekaan. NU hingga kini masih eksis dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai komitmen kebangsaan warga *nahdliyyin*, hal tersebut tentu tidak bisa dianggap remeh, mengingat ijtihad NU akan diikuti anggotanya yang notabene adalah warga negara Indonesia (Mustaqim, 2015).

Jika dilihat dari sejarahnya, NU merupakan ormas Islam yang menerima pertama kali dan mempelopori untuk menerima dan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya (Moesa, 2012). Sebagai mana Abdurrahman Wahid menegaskan sikap atas Pancasila untuk dijadikan acuan ideologis bersama, dimana kepentingan-kepentingan agama harus dibedakan dengan kepentingan-kepentingan bangsa dan negara (Barton, 1997). Menurut Masdar Hilmy penerimaan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Demokrasi, dan HAM adalah fitur penanda Islam moderat di Indonesia (Hilmy, 2012). Dari hal tersebut membuktikan NU tidak hanya sebagai ormas partisipan, namun menjadi patron bagi ormas dan gerakan keagamaan di Indonesia. Maka tidak berlebihan jika penulis mengatakan "menjaga NU, maka menjaga keutuhan NKRI"

Dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan mempertahankan kemerdekaan hingga kini tentu tidak lepas dari peranan perempuan. Dikalangan NU, muslimat juga berperan dalam dalam melawan penjajahan. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 75, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU melalui postingan Instagram @khofifah.ip membagikan photo dokumentasi

momen para sukarelawati Muslimat NU angkatan Dwikora di Jakarta tahun 1964-1965 terlihat berlatih membongkar pasang senjata, menembak, apel siaga. Hal tersebut merupakan bukti nyata kontribusi perempuan NU dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Tidak hanya Muslimat NU, organisasi perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama seperti Fatayat NU, dan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) juga banyak berkontribusi bagi bangsa dan negara mulai dari bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Zaman kini telah berubah, begitupun perjuangan dulu dan kini berbeda. Jika dahulu perjuangan mengangkat senjata, kini dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut yaitu dengan cara melakukan hal-hal positif yang tentunya bermanfaat bagi sesama manusia seperti halnya telah kita ketahui bersama kaum muda-mudi NU telah banyak berkiprah melakukan pemberdayaan *civil society* (Muhammad, 2015). Zaman boleh berubah, namun jiwa kepahlawanan tidak boleh berubah.

Seiring berkembangnya zaman, diiringi dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang disebut sebagai era keterbukaan, seluruh informasi terbuka lebar dan dapat di akses oleh siapa saja (Nurjanah, Rusmana, & Yanto, 2017). Dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi tentunya dapat memudahkan pekerjaan manusia. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memiliki dampak negatif, hal ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama. Internet sebagai sirkuit arus informasi dunia maya cenderung sangat bebas dan tidak terbatas, sehingga seringkali dimanfaatkan oleh individu maupun pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*), penyebaran isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang memecah belah bangsa, bahkan sampai penyebaran paham radikalisme (Ghifari, 2017).

Dunia maya kini bukan hanya tempat sebagai eksistensi identitas seperti memposting photo selfie semata, namun telah menjadi arena pertarungan wacana sampai pertarungan ideologi. Terlebih lagi saat momen pemilihan umum, sebut saja saat akan dilaksanakan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pada tahun 2019 terjadinya pertarungan politik di berbagai media sosial, selain banyaknya pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) di dunia nyata, sangat marak sekali informasi-informasi negatif yang disebar untuk saling serang satu sama lain antar para pendukung di dunia maya melalui media sosial yang banyak digunakan dari berbagai kalangan. Berkaca dari beberapa rentetan peristiwa tersebut tentu perlunya sikap dan respon para generasi penerus bangsa. Sebab, hal yang demikian tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

Menyikapi peristiwa diatas, perempuan Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung yaitu Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Lampung (PW Fatayat NU), dan Pengurus Koordinator Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (PKC KOPRI) di Provinsi Lampung melakukan suatu gerakan sebagai bentuk pencegahan aksi pelanggaran Pemilu di lingkungan masyarakat, juga melakukan gerakan tersebut di dunia maya utamanya media sosial. PW Fatayat NU Lampung, dan PKC KOPRI Lampung melakukan

Gerakan Literasi Politik sebagai gerakan mewujudkan masyarakat yang melek politik demi terciptanya demokrasi yang bermartabat dan kemajuan NKRI. Selain itu, literasi juga merupakan pintu awal dalam membuka pengetahuan dan peradaban dunia (Baharun & Rizqiyah, 2020).

Sejak sebelum Indonesia merdeka, NU memberikan sumbangsih besar bagi bangsa, organisasi keagamaan hingga kini masih relevan dan memainkan peran penting bagi bangsa dan negara, meskipun telah memasuki era globalisasi (Fealy & Bush, 2014). NU juga memainkan perannya dalam memberantas korupsi di Indonesia, yang mana dalam pandangan Gus Dur “*membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri pada ritus-ritus hanya akan membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju*”. Perjuangan melawan korupsi merupakan *ruhul jihad* yaitu sebuah perjuangan yang sejalan dengan spirit keagamaan (Wahid & Alim, 2017). Gerakan literasi politik yang dilakukan PW Fatayat NU Lampung, dan PKC KOPRI Lampung sebagai bentuk melanjutkan perjuangan NU di era global sebagai upaya mendukung pemerintah dalam menegakkan demokrasi yang adil dan berdaulat.

NU merupakan ormas Islam yang tidak terlibat dalam politik praktis (Iqbal, 2019), hal tersebut merupakan keputusan para alim-ulama dalam Muktamar ke-27 di Situbondo 1984 dengan keputusan tegas NU kembali ke Khittah 1926 (Hikam, 2001), dengan tidak lagi terlibat dalam politik praktis, artinya NU sebagai ormas menyikapi situasi, dan kondisi politik secara moderat berada di tengah-tengah (Ulum, 2014). Sebagaimana dicita-citakan Nahdlatul Ulama yang mengedepankan politik kebangsaan yaitu politik yang mengutamakan kepentingan bangsa, daripada kepentingan individu atau kelompok. Setelah sebelumnya penulis membahas Gerakan Literasi Digital Pelajar Nahdlatul Ulama (Syahputra, 2020), penulis juga merasa perlu mengkaji tentang bagaimana Gerakan Literasi Politik Perempuan Nahdlatul Ulama Lampung dalam Menyambut Pemilihan Umum 2019-2020 sebagai suatu kajian keislaman dan menambah kajian tentang NU, atau yang disebut NU Studies.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) (Dyah, 2005). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian yaitu bagaimana “*Gerakan Literasi Politik Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Menyambut Pemilihan Umum 2019-2020*”. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini memilih pendekatan kualitatif. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara dan observasi langsung mengamati kegiatan di lapangan (Sugiyono, 2015). Adapun data yang diperoleh berupa data kualitatif tanpa rumus, angka maupun hitungan (Moelong, 2002)

Agar tidak melebar, fokus penelitian ini mengkaji gerakan literasi politik yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Fatayat NU (PW Fatayat NU) Provinsi Lampung, dan Pengurus Koordinator Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (PKC KOPRI) Provinsi Lampung, penulis selain melakukan wawancara dengan pihak terkait, juga mengamati kegiatan secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia belum lama telah melewati perhelatan pesta demokrasi terbesar di negeri ini pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Pilpres), dan Pemilihan Legislatif 2019 (Pileg) melalui mekanisme pemilihan “satu orang satu suara” atau *one man one vote* (Irham, 2016). Setahun sudah kita melewati pesta demokrasi tersebut, kini pada tahun 2020 kembali akan diselenggarakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober 2020, karena Indonesia ditetapkan darurat covid-19 (Hasibuan, 2020). Dalam situasi darurat covid-19, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tetap dilaksanakan pada akhir tahun yaitu bulan Desember 2020.

Pilpres dan Pileg pada tahun 2019 masih sangat berbekas dalam ingatan kita semua tentang bagaimana dinamika Pemilu 2019 lalu, seperti halnya pertarungan wacana antar dua pendukung nomor 1 dan 2. Pertarungan wacana tersebut tidak hanya kita rasakan di dunia nyata, namun juga terasa di dunia maya begitu dahsyatnya. Bahkan, Pilpres 2019 memunculkan fenomena politik kece bong, dan kampret dikalangan netizen masyarakat maya. Kece bong merupakan labelisasi pendukung Jokowi-Amin, dan Kampret merupakan labelisasi pendukung Prabowo-Sandi (Hamid, Darwis, & Andriyani, 2018). Istilah itu berkembang di media sosial Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lainnya.

Era Digital yang digadang-gadang sebagai era disrupsi telah memunculkan budaya baru yang disebut budaya internet atau *cyberculture* dimana terjadinya proses digitalisasi, dalam keagamaan misalnya terjadi digitalisasi dakwah (Syahputra, 2020). Sangat memungkinkan juga untuk digitalisasi sistem politik (Bashori, 2018). Fenomena kece bong dan kampret pada Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pertarungan politik dalam pemilihan umum tidak hanya bergulir di dunia nyata, namun juga bergulir di dunia maya. Dengan memproduksi konten-konten kreatif bermuatan kampanye di media sosial. Konten-konten yang diproduksi dan dipublikasi di media sosial dapat mempengaruhi opini publik yang kemudian dapat menentukan perilaku politik mereka (Komariah & Kartini, 2019). Media sosial juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula seperti kalangan pelajar, dan mahasiswa (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Pertarungan politik baik di dunia nyata maupun maya apabila tidak dibarengi dengan pemahaman literasi politik, maka masyarakat akan mudah tergiring oleh opini yang dimanfaatkan sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politiknya. Literasi politik menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, utamanya kaum milenial sebagai pemilih pemula. Literasi politik harus berpijak pada norma, dan juga etika kemanusiaan yang bersifat filosofis, dan terlepas dari unsur agama apapun menjadi sangat perlu, bahkan menjadi kebutuhan yang penting untuk diajarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia (Trinarso, 2013). Sebab, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai agama (Hannan, 2018). Oleh karenanya, literasi politik menjadi penting agar tidak terjadi politisasi SARA (Pababbari, 2010).

Kita bersama menjadi saksi bagaimana maraknya politik identitas pada Pilpres dan Pileg 2019 yang sangat merugikan dan mencederai demokrasi (Zuhro, 2019). Politik identitas sebagai ancaman besar bagi keutuhan persatuan dan keharmonisan bangsa yang multikultur (Tansal, Latief, & Sanusi, 2020). Berkaitan dengan pentingnya literasi politik, studi terdahulu telah membuktikan bahwa yang menjadi faktor terbentuknya masyarakat yang melek politik adalah pemahaman mengenai literasi politik (Putri, 2017). Beberapa organisasi masyarakat telah banyak memainkan perannya dalam melakukan gerakan literasi politik. Organisasi perempuan berbasis keagamaan seperti PW Fatayat NU, dan PKC KOPRI memiliki peran yang sangat strategis sebagai pelaku perubahan politik (Roviana, 2014), dan tentu menunjukkan bahwa perempuan juga berhak berbicara politik.

Keikutsertaan perempuan Islam di Indonesia yang tergabung dalam organisasi otonom tidak dapat dipungkiri senantiasa mengalami pasang surut disetiap aktivitas perjuangannya, awalnya organisasi perempuan Islam menekankan pendidikan yang dapat membuka cakrawala kaum perempuan, dan memberikan kesadaran bahwa kaum perempuan memiliki derajat yang sama dengan kaum laki-laki, yang kemudian juga membentuk kesadaran politik perempuan semakin mengkristal (Isnaenyah, 2017). Pemikiran perempuan NU telah banyak berpengaruh sehingga memiliki banyak pengikut. Bahkan, pemikiran politik perempuan NU telah menjadi rujukan banyak aktivis perempuan Islam di Indonesia (Eriyanti, 2016).

Gerakan literasi politik yang dilakukan oleh PW Fatayat NU Provinsi Lampung dan PKC KOPRI Provinsi Lampung tidak hanya di dunia nyata, namun juga dilakukan di dunia nyata diberbagai media sosial. Walaupun NU merupakan ormas yang tetap mempertahankan nilai tradisional ditengah modernitas yang terus bergulir. Namun, NU tidak menutup diri dari perkembangan zaman, NU tetap mempertahankan tradisi lama yang baik, dan mengambil budaya baru yang lebih baik sesuai dengan kaidah (Mustamar, 2016):

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: "Menjaga tradisi lama yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik".

Kaidah diatas menjadi pedoman NU dalam merespon perkembangan zaman, tidak terkecuali PW Fatayat NU Provinsi Lampung dan PKC KOPRI Provinsi Lampung sebagai organisasi yang lahir dari rahim NU. Terlebih di masa pandemi Covid-19 tentunya menyebabkan ruang gerak yang terbatas, walaupun telah memasuki *New Normal Era* akan tetapi melakukan perkumpulan adalah hal yang sangat dilarang oleh pemerintah, sehingga dalam melakukan gerakannya PW Fatayat NU Provinsi Lampung dan PKC KOPRI Provinsi Lampung memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (Syahputra, 2020). Berikut adalah gerakan literasi politik perempuan NU dalam menyambut Pemilihan Umum 2019-2020:

## **Gerakan Literasi Politik Fatayat NU Lampung**

Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi Lampung memainkan peran penting dalam melakukan gerakan literasi politik di Provinsi Lampung khususnya, lebih luasnya di kancah nasional. Gerakan literasi politik PW Fatayat NU Provinsi Lampung dimulai dari dalam organisasi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan narasumber:

PW Fatayat NU Provinsi Lampung dalam salah satu program kerjanya dibidang Hukum Politik dan Advokasi bergerak aktif dalam gerakan literasi politik ke kader Fatayat NU sendiri atau ke masyarakat langsung (Khalida, 2020).

Kepedulian PW Fatayat NU Provinsi Lampung dalam politik terlihat dari program kerja yang telah disusun oleh kepengurusannya, dalam program kerja tersebut PW Fatayat NU Provinsi Lampung bergerak aktif dalam memberikan literasi politik kepada kader-kader PW Fatayat NU Provinsi Lampung sebagai proses kaderisasi non-formal, selain itu PW Fatayat NU Provinsi Lampung melakukan gerakan aktif literasi politik kepada masyarakat luas.

## **Bekerjasama dengan Berbagai Elemen**

Gerakan literasi politik PW Fatayat NU Provinsi Lampung dilakukan saat menjelang Pemilu, sebagaimana berikut:

Dalam setiap momen pemilu dan pilkada sebagai organisasi masyarakat kita selalu dilibatkan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk menerima materi-materi atau pemahaman tentang pemilu yang berhubungan dengan pemilu nantinya ilmu itu di bagikan kembali ke anggota Fatayat NU dan masyarakat (Khalida, 2020).

PW Fatayat NU Provinsi Lampung melakukan gerakan literasi politik saat akan menjelang pelaksanaan pemilihan umum, bahkan PW Fatayat NU Provinsi Lampung selalu dilibatkan oleh penyelenggara pemilu pemerintahan seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung dengan diundangnya PW Fatayat NU Provinsi Lampung dalam acara-acara yang diadakan oleh penyelenggara dan diberikan materi-materi atau pemahaman yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, kemudian pemahaman tersebut yang kemudian dibagikan melalui kaderisasi internal di PW Fatayat NU Provinsi Lampung, juga kemudian di sosialisasikan kepada masyarakat. Keterlibatan PW Fatayat NU Provinsi Lampung tidak hanya pada penyelenggara pemilu, namun juga pada kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan politik.

PW Fatayat NU Lampung beberapa kali terlibat sebagai narasumber dalam forum diskusi politik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, Perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat yang ada di Provinsi Lampung (Sri Wahyuni, 2020).

PW Fatayat NU Lampung tidak hanya terlibat sebagai peserta dalam beberapa kegiatan yang berkenaan dengan politik. Namun juga terlibat sebagai narasumber dalam forum diskusi yang diadakan oleh KPU Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu terlibat dalam ruang-ruang diskusi berkenaan dengan politik.

Keterlibatan PW Fatayat NU Provinsi Lampung juga dalam acara seperti bedah buku yang materinya tentang politik atau demokrasi selalu menjadi menjadi hal yang menarik bagi kami. Pada kancah internasional yang bertempat di Jakarta, perwakilan PW Fatayat NU Provinsi Lampung menghadiri dan menjadi peserta aktif pada acara *International Young Muslim Women Forum (IYMWF)* yang diadakan oleh Pengurus Pusat Fatayat NU pada 24 Oktober 2018 di Hotel Aryaduta Jakarta dan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. IYMWF adalah sebuah forum yang didalamnya berkumpul perwakilan organisasi perempuan sedunia yang membicarakan banyak hal salah satunya menyangkut politik. (Khalida, 2020).

Berdasarkan wawancara di atas, PW Fatayat NU Provinsi Lampung juga terlibat dalam berbagai acara yang berkenaan dengan politik dan demokrasi, seperti halnya bedah buku yang juga membahas tentang politik dan demokrasi. Bahkan, PW Fatayat NU Provinsi Lampung terlibat dalam forum perempuan muslim internasional yang didalamnya terdiri dari perwakilan-perwakilan organisasi perempuan muslim dunia. Adapun salah satu pembahasannya berkenaan dengan politik. PW Fatayat NU Provinsi Lampung terlibat sebagai peserta aktif dalam forum perempuan muslim internasional tersebut. Dalam gerakan literasi politik di lingkungan masyarakat PW Fatayat NU Provinsi Lampung fokus dalam pencegahan.

PW Fatayat NU Provinsi Lampung dalam gerakannya fokus dalam hal pencegahan bersama Bawaslu kita mengikuti tata cara pelaporan pelanggaran pemilu dan melakukan gerakan perempuan tolak politik uang (Khalida, 2020).

Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa PW Fatayat NU Provinsi Lampung dilibatkan langsung oleh penyelenggara, PW Fatayat NU Provinsi Lampung dalam gerakan literasi politik fokus pada pencegahan pelanggaran yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung dengan mengikuti tatacara pelaporan pelanggaran Pemilu dan PW Fatayat NU Provinsi Lampung melakukan gerakan perempuan tolak politik uang, sebab politik uang menjadi salah satu yang marak dilakukan dan tentu hal itu telah mencederai demokrasi.

Sesungguhnya literasi politik yang harus pertama dilakukan kepada yang terdekat terlebih dahulu seperti keluarga. Dalam satu keluarga biasanya terdapat remaja sebagai generasi millennial yang juga sebagai pemilih pemula, peran perempuan dalam keluarga (ibu) memberikan literasi politik yang bijak kepada anaknya dalam kondisi ruang media sosial yang dipenuhi berita *hoax* dan ujaran kebencian. Peran perempuan dalam posisi sebagai ibu menjadi penting dalam hal ini. PW Fatayat NU Lampung juga menggandeng organisasi perempuan yang sudah mengakar lama seperti PKK yang didalamnya hampir semua anggotanya adalah perempuan untuk menjadi pemilih yang bijak dan cerdas dalam situasi dan kondisi apapun tidak memanfaatkan ruang dan pandemi covid-19 ini untuk menerima bantuan atau uang dengan berbagai alasan dan maksud-maksud tertentu yang ditenggarai mengarah kepada calon yang bersangkutan (Khalida, 2020).

Sebagai perempuan Nahdlatul Ulama kita harus dan wajib terlibat dalam memberikan literasi politik tidak hanya kepada kader atau anggota kami



tetapi juga kepada simpul-simpul masyarakat karena PW Fatayat NU Provinsi Lampung bisa bermitra kepada siapa saja. PW Fatayat NU Provinsi Lampung secara tegas menolak politik uang, mengikuti fatwa ulama yang memberi dan menerima hukumnya adalah haram. Pemahaman ini harus kira samakan persepsi dan mindsetnya ditengah masyarakat, karena itulah menjadi penting bagi kami untuk terlibat langsung didalamnya (Khalida, 2020).

Literasi politik dimulai sejak dalam keluarga, oleh karena itu PW Fatayat NU Provinsi Lampung menggandeng organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kemudian mengingatkan kepada seluruh keluarga agar tidak dengan mudahnya menerima bantuan atau politik uang yang dilakukan calon kepala daerah tertentu walaupun keadaan ekonomi saat pandemi covid-19 ini kurang baik. Sebab hal itu termasuk mencederai demokrasi, dan hal tersebut menurut fatwa ulama adalah haram hukumnya baik yang memberikan maupun yang menerima. PW Fatayat NU Provinsi Lampung mengajak para ibu yang tergabung dalam PKK agar dapat mengedukasi anak-anaknya tentang pentingnya paham literasi politik, terlebih literasi politik ini penting diberikan kepada anak yang menginjak masa remaja, sebagai pemilih pemula agar tidak mudah terpengaruh oleh pilihan orang lain, juga isu-isu yang tersebar diberbagai media. Literasi politik kepada pemilih pemula sangatlah penting sebagaimana dinyatakan informan:

Penting sekali melakukan literasi politik kepada pemilih pemula mengingat pemilih pemula secara kuantitas signifikan, dan mengingat tipikal pemilih pemula masih rentan berubah-ubah cara pandangnya menyikapi hal-hal berbau politik, maka dikhawatirkan akan menimbulkan sikap-sikap sebagai berikut : sikap apatis atau sikap acuh tak acuh terhadap politik, sikap sinisme, sikap mudah mengkooptasi dan mudah dimobilisasi oleh pihak tertentu untuk kepentingan semata-mata mempertahankan status kekuasaannya. Selain itu, bertujuan agar tingkat partisipasi pemilih naik, khususnya pemilih pemula dan memiliki daya kritis terhadap perkembangan politik di Lampung (Wirdayati, 2020).

### **Ronda Fatayat NU dan Ngaji Demokrasi**

PW Fatayat NU Provinsi Lampung memiliki program kerja khusus sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal dan mengawasi Pemilihan Umum sebagaimana dinyatakan informan: Bukti keseriusan kami saat acara itu berlangsung dengan mendeklarasikan Ronda PW Fatayat NU Provinsi Lampung, kami mengambil bagian dari pesta demokrasi dengan melakukan ronda saat Pemilu berlangsung dan konotasi ronda ini tidak selalu dimaknai dengan gambaran seorang laki-laki bersarung keliling kampung, tapi ronda ala PW Fatayat NU Provinsi Lampung adalah dalam fungsi sebagai mitra penyelenggara pemilu melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik pelanggaran pemilu seperti politik uang dan lainnya (Khalida, 2020).

Ronda PW Fatayat NU Provinsi Lampung adalah program kerja sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah agar terciptanya pemilihan umum yang adil, dan demokratis. Ronda PW Fatayat NU Provinsi Lampung ini dilakukan saat akan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum, istilah ronda ini

dimaksudkan agar PW Fatayat NU Provinsi Lampung melakukan penjagaan berupa pengawasan terhadap praktik-praktik pelanggaran pemilu seperti politik uang dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Program Ronda Fatayat NU bekerja secara mandiri, ikhlas untuk ikut andil mengawasi pelaksanaan pilkada khususnya pengawasan tahapan pilkada, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak gelaran Pilpres dan Pileg 2019, tahun inipun akan digerakan mengingat situasi pandemi Covid-19 (Wirdayati, 2020).

Ronda Fatayat NU mulai dilaksanakan saat menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Pilpres 2019), juga Pemilihan Legislatif 2019 (Pileg 2019). Gerakan ini dilakukan secara mandiri sebagai bentuk andil PW Fatayat NU Lampung dalam mengawasi Pemilihan Umum. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 juga akan digerakkan Ronda Fatayat NU, mengingat saat situasi pandemi Covid-19 sangat rawan terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Umum.

Program kerja PW Fatayat NU Provinsi Lampung lainnya yang juga berkenaan dengan gerakan literasi politik adalah kegiatan Ngaji Demokrasi, sebagaimana informan menyatakan: Kegiatan kita yang lain yaitu ngaji demokrasi bersama KPU juga kita lakukan dengan mengundang kader kita sebagai bekal pemahaman pemilu kepada mereka. Kita menggunakan istilah ngaji karena kata itu terasa sangat dekat dengan kita sebagai nahdliyyin dan memberikan pemahaman juga dalam sebuah majelis kita bisa bicara apa saja mencari ilmu apa saja selain memperdalam ilmu agama (Khalida, 2020).

### **Webinar Literasi Politik Fatayat NU Lampung**

PW Fatayat NU Lampung dalam menyambut Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 juga melakukan gerakan literasi politik memanfaatkan media teknologi, informasi, dan komunikasi, sebagaimana dinyatakan informan:

Dalam rangka menyambut dan mensukseskan gelaran pilkada 2020 dimasa pandemi Covid-19 kita mengadakan webinar bertemakan “Perempuan dan Pilkada” pada 27 Juni 2020 secara khusus mengundang semua narasumber penyelenggara pemilu seperti KPU Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung juga para akademisi, praktisi pemilu DPR RI juga narasumber nasional sebagai keynote speaker kita. Acara ini dilaksanakan secara virtual dengan segmen bukan hanya dari kalangan Fatayat NU saja tapi juga masyarakat umum tidak terbatas ruang dan tempat, Alhamdulillah dihadiri banyak peserta dari luar provinsi Lampung mereka sangat antusias berbicara tentang perempuan dan pilkada. Semua dikupas apakah perempuan sebagai objek, atau subjek pelaku pilkada itu sendiri, dimana posisi perempuan, bagaimana memilih pemimpin yang pro hak dan kepentingan juga respect terhadap perjuangan perempuan termasuk kiat mengatasi maraknya politik uang atau bansos ditengah pandemi covid-19 (Khalida, 2020).

Pilkada 2020 ini adalah momen pemilihan umum yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pilkada 2020 dilaksanakan disaat Indonesia sedang dalam masa darurat pandemi Covid-19. Namun demikian, PW Fatayat NU Lampung tetap melakukan literasi politik dengan menggunakan aplikasi

zoom virtual meeting. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen PW Fatayat NU Lampung dalam mewujudkan pemilihan umum yang adil dan bermartabat demi terciptanya masa depan bangsa yang maju yang juga sesuai dengan cita-cita NU, Bahkan, dalam acara Webinar literasi politik tersebut tidak hanya masyarakat Lampung yang menjadi pesertanya akan tetapi seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam melaksanakan webinar PW Fatayat NU Lampung melibatkan KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung dan KPID Provinsi Lampung dan beberapa pakar.

PW Fatayat NU Lampung menggelar literasi politik dengan mengundang stake holder terkait seperti KPU, Bawaslu, dan KPID Lampung sebagai gugus tugas pemilu. Teknis pelaksanaan kegiatan dengan mengadakan webinar literasi politik dengan narasumber para pakar dibidang dan penyelenggara pemilu, pesertanya dari pengurus Fatayat NU Lampung dan masyarakat umum seluruh Indonesia. Tujuannya, agar para peserta dalam hal ini pengurus fatayat dan keluarga serta masyarakat lebih melek politik dan tereduksi saat pilkada berlangsung, sehingga bisa memilih pemimpin terbaik di daerahnya masing-masing (Sri Wahyuni, 2020).

Tujuan diadakannya webinar literasi politik sebagaimana dinyatakan oleh narasumber: Kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan PW Fatayat NU Provinsi Lampung dalam menyongsong Pilkada serentak pada 09 Desember 2020 dalam rangka bertujuan untuk mewujudkan Pilkada yang damai, adil dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab seperti kegiatan Webinar pilkada dan perempuan menghadirkan narasumber dari KPU, Bawaslu, Pengamat Politik, dan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Selain mengadakan literasi politik PW Fatayat NU Provinsi Lampung juga mengadakan webinar literasi media. Kegiatan literasi media agar bijak, cerdas menonton, dan menggunakan konten digital (Wirdayati, 2020).

PW Fatayat NU Lampung selain mengadakan webinar literasi politik, juga memberikan pemahaman literasi media melalui webinar yang bertema "Bijak, Cerdas Menonton TV dan Menggunakan Konten Digital" pada 09 Juli 2020. Sebab dalam pemilihan umum 2020 ini lebih banyak memanfaatkan media informasi seperti media sosial. Literasi politik dan literasi media dalam Pilkada 2020 keduanya tidak dapat dipisahkan dikarenakan dinamika politik yang terjadi tidak hanya di dunia nyata, namun juga terjadi di dunia maya. Sebagaimana dinyatakan informan:

Dimasa pandemi Covid-19 ini, dimana akses informasi lebih banyak didapat dari media baik mainstream maupun platform media lainnya. Dengan literasi politik diharapkan para pemilih lebih melek politik dan bisa memilih pemimpin terbaik, sehingga daerahnya maju dan masyarakatnya menjadi makmur, *baldatun thayibatun wa rabbun ghafur* (Sri Wahyuni, 2020).

### **Gerakan Literasi Politik PKC Kopri Lampung**

Pembahasan diatas tentang bagaimana gerakan literasi politik yang dilakukan oleh PW Fatayat NU Provinsi Lampung sebagai wadah pemuda NU. Mahasiswa NU dalam hal ini juga memainkan perannya, sebagaimana gerakan literasi politik yang dilakukan oleh PKC KOPRI Provinsi Lampung sebagai

organisasi perempuan Nahdlatul Ulama dikalangan mahasiswi perguruan tinggi di Provinsi Lampung.

Pengurus Koordinator Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (PKC KOPRI) Provinsi Lampung terpilih dan terbentuk kepengurusan baru pada bulan November 2019. Sejak terpilih dan terbentuknya kepengurusan baru PKC KOPRI Provinsi Lampung telah banyak melakukan program-program kerjanya. Salah satu program kerjanya berkaitan dengan literasi politik. Adapun gerakan literasi politik PKC KOPRI Provinsi Lampung sebagai berikut:

### **PKC KOPRI Lampung Terlibat dalam Beberapa Forum Diskusi Politik**

PKC KOPRI Provinsi Lampung terlibat dalam beberapa kegiatan berkenaan dengan politik yang diadakan oleh beberapa media baik media online, juga media televisi sebagaimana informan menyatakan: PKC KOPRI Provinsi Lampung pernah menjadi peserta dalam sosialisasi yang diadakan oleh Lampung Pro dan juga TVRI Lampung yaitu refleksi akhir tahun yang berkaitan dengan politik dan proyeksi politik 2020 dengan narasumber pakar politik, anggota KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Acara tersebut ditayangkan di TVRI Lampung. Kami bersama organisasi kepemudaan lainnya menjadi peserta. (Anggun, 2020).

PKC KOPRI Provinsi Lampung pada tahun 2019 juga pernah mengikuti berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi lain, lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Pernah menghadiri kegiatan yang diadakan Bawaslu Provinsi Lampung dalam Workshop Eksaminasi Peraturan Perundangan di Emersia Hotel dan Resort pada 07 November 2019. Hadir juga beberapa organisasi-organisasi pemuda yang ada di Provinsi Lampung dan beberapa lembaga. Kami dari berbagai organisasi diajak oleh Bawaslu Provinsi Lampung untuk menyamakan persepsi dan bersama-sama untuk mengawasi pemilu ini (Mau'idzatul, 2020).

Sebagai organisasi kepemudaan PKC KOPRI Provinsi Lampung terlibat aktif dalam kegiatan berkenaan dengan politik. Hal tersebut menjadi pemahaman baru dan dapat disampaikan kepada para kader-kader KOPRI di Lampung secara sistematis mulai dari tingkat Rayon, Komisariat, Cabang, sampai Koordinator Cabang. Selain pemahaman tersebut dibagikan kepada kader-kader KOPRI juga di intruksikan untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik yang menuju kepada pelanggaran Pilkada 2020 mendatang.

### **Webinar Literasi Politik KOPRI Lampung**

Perkembangan zaman beriringan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan TIK juga harus diiringi keterampilan dalam memanfaatkannya, terlebih untuk generasi muda sebagai generasi milenial yang banyak menggunakan media sosial. PKC KOPRI Provinsi Lampung sebagai organisasi pemuda telah mengambil peran dalam memanfaatkan TIK untuk hal-hal yang positif, sebagaimana literasi politik yang dilaksanakan melalui media dalam jaringan sebagai berikut:

PKC KOPRI Provinsi Lampung di tengah pandemi Covid-19 ini tentu semua kegiatan dialihkan menjadi kegiatan virtual yang dilakukan menggunakan media dalam jaringan. Salah satu kegiatan yang diadakan oleh PKC KOPRI Provinsi Lampung melalui media dalam jaringan adalah kegiatan literasi politik yang bertemakan "*Eksistensi Perempuan dalam Dunia Politik*" dengan narasumber dr. Jihan Nurlela anggota DPD RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui live streaming Instagram akun @koprilampung. Adapun tujuannya agar perempuan-perempuan harus tau bahwasanya politik itu bukan hal yang menyeramkan, dan perempuan juga bisa masuk ke dunia politik, eksistensinya ketika perempuan sudah masuk ke dunia politik mereka juga harus tahu dan paham tempatnya dimana dan posisinya dimana, bukan hanya menjadi pelengkap dalam dunia politik. Kegiatan ini diikuti peserta berjumlah 600 kurang lebih dengan durasi satu setengah jam (Anggun, 2020).

Sebagaimana dinyatakan informan bahwa webinar tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa perempuan sama dengan laki-laki mampu berkecimpung dalam dunia politik. Kemudian informan lain menyatakan: Literasi politik sangat penting bagi perempuan karena yang kita lihat faktanya bahwa yang lebih tertarik dalam isu-isu politik itu adalah laki-laki baik itu di desa maupun di kota, perempuan-perempuan itu biasanya kurang tertarik dengan isu-isu politik. Ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan tentang pendidikan politik bagi perempuan atau bagi pemilih pemula karena ternyata masih banyak sekali yang awam tentang dunia politik, bahkan merasa acuh dengan dunia politik dan banyak sekali kami temui perempuan-perempuan ketika hendak memilih pemimpin itu hanya ikut-ikutan memilih, seperti ikut kata suami, atau memilih yang banyak dibicarakan masyarakat (Mau'idzatul, 2020).

Hal tersebut diatas menunjukkan rendahnya pemahaman literasi politik masyarakat dengan sederet bukti yang dinyatakan informan. Maka, literasi politik menjadi sangat penting mengingat jika rendahnya masyarakat tentang pemahaman literasi politik akan sangat mudah sekali dimobilisasi oleh oknum tertentu demi kepentingan tertentu dalam pemilihan umum. Berkaitan dengan Pilkada 2020 yang dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19, sudah seharusnya gerakan literasi politik juga dilakukan di dunia maya, sebab pemilih pemula juga sebagai pengguna media sosial paling banyak sangat mudah dipengaruhi melalui konten-konten media sosial bermuatan politik yang cenderung memecah belah bangsa. Sebagaimana dinyatakan informan:

Sebagai perempuan NU literasi politik itu sangat penting untuk seluruh pemilih yang terdaftar di DPT, bukan hanya saat pandemi Covid-19. Namun, tren politik nasional saat ini berada pada titik puncak keterbukaan, propaganda yang diproduksi secara bebas di media sosial yang penggiatnya banyak dan media sosial sangat berpengaruh untuk semua kegiatan apalagi kaitannya dengan politik, bahkan yang aktif di media sosial ini paling banyak adalah pemilih pemula maka literasi politik menjadi penting untuk membekali pengetahuan politik. Pilkada 2020 adalah wadah memilih pemimpin artinya suara kita menentukan masa depan kita, masa depan bangsa dikemudian hari. Bagaimana kita dapat melahirkan dan memunculkan pemimpin-pemimpin

yang baik, kita juga harus memiliki pemahaman literasi politik bukan hanya asal. Misalnya diberikan iming-iming seperti *money politic* menjadi tergiur dan kita terima kemudian kita memilih pemimpin yang memberikan kita uang tanpa tahu dampak kedepan seperti apa (Anggun, 2020).

Gerakan literasi politik PKC KOPRI Provinsi Lampung yang bertujuan untuk memberikan pemahaman literasi politik kepada kader KOPRI maupun kepada masyarakat bukan semata-mata edukasi dalam melaksanakan pemilu, dan agar terhindar dari isu-isu politik yang tersebar di media sosial saat momen pemilu. Namun lebih dari itu, Gerakan literasi politik PKC KOPRI Provinsi Lampung untuk menciptakan masa depan bangsa yang bermartabat, yang dimulai dari proses pemilihan umum yang bersih, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang baik, untuk masa depan masyarakat, daerah, dan bangsa lebih baik.

## KESIMPULAN

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, maupun Kepala Daerah seringkali diwarnai berbagai pelanggaran dalam prosesnya baik penyebaran berita bohong, isu-su SARA, bahkan politik uang. Perempuan Nahdlatul Ulama Lampung dalam hal ini PW Fatayat NU Lampung dan PKC KOPRI Lampung memainkan perannya dalam menjaga martabat demokrasi Indonesia melalui beberapa program yang dilakukan secara terstruktur dan terukur dalam memberikan pemahaman literasi politik maupun membantu penyelenggara dalam melakukan pengawasan pelanggaran-pelanggaran Pemilu baik di dunia nyata maupun dunia maya sebagai ikhtiar dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat demi terciptanya Pemilu yang kondusif dan mampu melahirkan pemimpin yang amanah dan dapat memajukan daerah melalui program kerja PW Fatayat NU Lampung dan PKC KOPRI Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2019). *Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan Abad Ke-21*. Yogyakarta: Diva Press.
- Baharun, H., & Badriah, F. N. (2020). Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said Aqil Siroj. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 37-51. Retrieved from <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Baharun, H., & Rizqiyah, L. (2020). Melejitkan Ghiroh Belajar Santri Melalui Budaya Literasi di Pesantren. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 108. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3048>
- Barton, G. (1997). Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual "Ulama": The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism in Neo-Modernist Thought. *STUDIA ISLAMIKA: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 4(1).

- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *SUKMA: Jurnal Pendidikan*, 2(2).
- Bizawie, Z. M. (2016). Islam Nusantara Sebagai Subjek Dalam Islamic Studies: Lintas Diskursus dan Metodologis. In *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan.
- Dakir, & Anwar, H. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 495-517.
- Dakir, & Fauzi, A. (2019). Epistemologi Pendidikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin di Era Revolusi Industri 4.0; Sebuah Kajian Paradigmatik. *Edureligian: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 92-100. Retrieved from <http://jurnaljpi.com/index.php/JPI/article/view/28>
- Dyah, H. M. (2005). *Penelitian Kualitatif Dalam Penerapan*. Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa.
- Eriyanti, L. D. (2016). Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1).
- Fealy, G., & Bush, R. (2014). The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama. *Asian Journal of Social Science*, 42(5).
- Feillard, A. (1999). *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS.
- Ghifari, I. F. (2017). Radikalisme di Internet. *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1), 123-134. <https://doi.org/10.15575/jw.v39i1.575>
- Goncing, N. (2015). Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1).
- Hamid, A., Darwis, & Andriyani, S. (2018). Fenomena Politik Cebong dan Kampret di Indonesia: Sebuah Analisis dari Perspektif Penikiran Politik dalam Islam. *Jurnal Politea*, 1(1).
- Hannan, A. (2018). Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuatan Blater dalam Pertarungan Politik Lokal Madura. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2).
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19. 'ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, 4(1).
- Hikam, M. A. S. (2001). *Fiqh Kewarganegaraan, Intervensi Agama-Agama terhadap Masyarakat Sipil*. Jakarta: PB PMII.
- Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia?: Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2).
- Iqbal, M. M. (2019). Nahdlatul Ulama dalam Pusaran Politik: Sebuah Otokritik Orientasi NU dalam Politik Perspektif Insider. *JISoP: Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2).
- Irham, M. A. (2016). *Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ismail, F. (2011). The Nahdlatul Ulama: Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State. *Journal of Indonesian Islam*, 5(2).

- Isnaeniyah, E. (2017). Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi "NU." *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1).
- Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Millennial dalam Pemilu. *ARISTO: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 7(2).
- Mardiyah. (2015). *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Masyhuri, M. (2016). NU dan Paradigma Teologi Politik Pembebasan: Refleksi Historis Pasca Khittah. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2).
- Moelong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moesa, A. M. (2012). Kiai NU dalam Paradigma Politik Kebangsaan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2(1).
- Muhammad, F. (2015). Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9(1).
- Mustamar, M. (2016). *Dalil-dalil Praktis Amaliah Nahdliyah*. Surabaya: Muara Progresif.
- Mustaqim, M. (2015). Politik Kebangsaan Kaum Santri: Studi atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama. *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam*, 9(2).
- Muzakki, A. (2020). *NU dan Politik Keadaban Publik*. Surabaya: LTN Pustaka.
- Nurjanah, E., Rusmana, A., & Yanto, A. (2017). Hubungan Literasi Digital dengan Kualitas Penggunaan E-Resources. *Jurnal Lentera Pustaka*, 3(2).
- Pababbari, M. (2010, November). *Patronase Agama Dalam Kehidupan Politik Lokal (Melemahnya Nilai-Nilai Tradisional Agama Masyarakat)*. Banjarmasin.
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2).
- Roviana, S. (2014). Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan Islam*, III(2).
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Syahputra, M. C. (2020a). Gerakan Literasi Digital Pelajar Nahdlatul Ulama. *TARBIYATUNA: Kajian Pendidikan Islam*, 4(2).
- Syahputra, M. C. (2020b). Jihad Santri Millennial Melawan Radikalisme di Era Digital: Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara di Media Sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1).
- Syahputra, M. C. (2020c). Pendidikan Orang Tua Terhadap Anak dalam Menyikapi Pandemi Covid-19. *EQUALITA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1).
- Tansal, E. A., Latief, R., & Sanusi, H. (2020). Representasi Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 Pada Pemberitaan Kompas.com. *Jurnal Washiyah*, 1(1).
- Trinarso, A. P. (2013). Pendidikan dan Etika Berpolitik. *Arete: Jurnal Filsafat*, 2(2).



- Ulum, A. (Ed.). (2014). *The Founding Fathers of Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Bina Aswaja.
- Wahid, M., & Alim, H. (Eds.). (2017). *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1).